

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Menurut M.S Sarumaha (2020) Model Pembelajaran adalah suatu struktur yang menyajikan rencana sistematis pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu gambaran secara umum, namun dengan poin-poin yang berfokus pada pencapaian tujuan spesifik.

Model pembelajaran merupakan sebuah rencana atau pola yang dipakai sebagai panduan dalam merencanakan proses pembelajaran di kelas maupun dalam sesi tutorial. Model pembelajaran merujuk pada pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran, mencakup tujuan pengajaran, langkah-langkah dalam aktivitas pembelajaran, konteks pembelajaran, dan manajemen kelas.

Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus.

Model pembelajaran terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran dilakukan sesuai dengan keadaan atau situasi sekitarnya. Tujuan pengajaran langkah- langkah dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan semua termasuk istilah “model pembelajaran”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, salah satu keterampilan penting bagi seorang guru dalam proses pembelajaran adalah kemampuan memilih metode yang tepat. Pemilihan metode ini secara langsung terkait dengan upaya guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman guru tentang kedudukan metode sebagai komponen kunci untuk kesuksesan kegiatan pembelajaran menjadi sangat esensial. Metode dianggap sama pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam

keseluruhan struktur pendidikan, dan pemahaman ini menjadi hal mendasar bagi seorang guru.

2. Prinsip – Prinsip Model Pembelajaran

Menurut Shilphy A. Octavia mengatakan bahwa untuk memilih model yang tepat, penting mempertimbangkan hubungannya dengan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam praktiknya, setiap model pembelajaran dapat dianggap baik jika memenuhi prinsip-prinsip berikut :

- 1) Semakin kecil tugas guru dan semakin besar aktivitas belajar peserta didik, maka hasilnya semakin baik.
- 2) Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan guru untuk mengaktifkan peserta didik untuk belajar.
- 3) Sesuai dengan gaya belajar peserta didik.
- 4) Dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua guru dan
- 5) Tidak ada metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik.

3. Ciri – Ciri Model Pembelajaran

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pendekatan, strategi, metode dan teknik. Karena itu, suatu rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran disebut menggunakan model pembelajaran apabila mempunyai empat ciri khusus, yaitu rasional teoritis yang logis yang disusun oleh penciptanya atau pengembangnya, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai), tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur dalam Trianto, 2007).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diuraikan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan inti pembelajaran di dalamnya ada implementasi model pembelajaran sesuai dengan yang di rencanakan.

Pada umumnya, model-model mengajar yang baik memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat dikenal secara umum sebagai berikut :

1. Memiliki prosedur yang sistematis. Jadi, sebuah model mengajar merupakan prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa, yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
2. Hasil belajar ditetapkan secara khusus. Setiap model mengajar menentukan tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang diharapkan dicapai siswa secara rinci dalam bentuk unjuk kerja yang dapat diamati. Apa yang harus dipertunjukkan oleh siswa setelah menyelesaikan urutan pengajaran disusun secara rinci dan khusus.
3. Penetapan lingkungan secara khusus. Menetapkan keadaan lingkungan secara spesifik dalam model mengajar.
4. Ukuran keberhasilan. Menggambarkan dan menjelaskan hasil-hasil belajar dalam bentuk perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa setelah menempuh dan menyelesaikan urutan pengajaran.
5. Interaksi dengan lingkungan. Semua model mengajar menetapkan cara yang memungkinkan siswa melakukan interaksi dan bereaksi dengan lingkungan.

4. Manfaat Model Pembelajaran

Manfaat model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dan materi yang dibelajarkan, tujuan (kompetensi) yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan siswa (Mulyono, 2018, hlm. 90).

1. Bagi guru
 - a. Memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebab langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada.
 - b. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran.

- c. Memudahkan untuk melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu relative singkat.
 - d. Memudahkan untuk menyusun bahan pertimbangan dasar dalam merencanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam rangka memperbaiki atau menyempurnakan kualitas pembelajaran.
2. Bagi siswa
- a. Kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
 - b. Memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran.
 - c. Mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh.
 - d. Dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara objektif.

B. Konsep Model *Project Citizen*

1. Pengertian *Project Citizen*

Project Citizen awalnya dilaksanakan di California, Amerika Serikat pada tahun 1992 dan menjadi program nasional pada tahun 1995 melalui kerjasama *Center for Civic Education (CCE)* dan Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara (Budimansyah dalam Anita, 2020, hlm. 4). Model ini kemudian diadopsi sebagai “Proyek Pembelajaran Kewarganegaraan Kita Bangsa Indonesia (PKKBI)” yang dirintis oleh *Center for Civic Education (CCE)* dan Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional Jawa Barat. *Project Citizen* sendiri berevolusi dari model pendekatan kritis atau reflektif yang pertama kali diperkenalkan oleh John Dewey dalam paradigma “*How We Think*”.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Project Citizen*) merupakan suatu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah karakter dan kewarganegaraan di sekitar mereka dan mencari solusinya. Model ini juga bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik pada peran negara dan warga negara dalam penyelesaian masalah-masalah publik atau yang berkaitan dengan karakter dan kewarganegaraan. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan (*Project Citizen*) sebagai bentuk pendidikan demokrasi, mengajarkan peserta didik tentang peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses perumusan dan implementasi solusi terhadap masalah karakter dan kewarganegaraan.

Pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan (*Project Citizen*) adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai langkah awal untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan baru berdasarkan pengalaman nyata. Implementasi *Project Citizen* dilakukan secara terstruktur dan melibatkan peserta didik dalam pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui proses investigasi dan perancangan produk. Proyek kewarganegaraan (*Project Citizen*) merupakan suatu pendekatan pembelajaran inovatif dalam pendidikan kewarganegaraan, yang menekankan pembelajaran kontekstual melalui kegiatan kompleks. Pembelajaran berbasis proyek memberikan peluang bagi peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kreativitas melalui inisiatif mereka dalam menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah nyata yang kontekstual.

Pendekatan pembelajaran *Project Citizen* dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi dalam proses belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan. Selama ini, pendidikan kewarganegaraan cenderung didominasi oleh kegiatan menghafal definisi, pengertian, dan tahun-tahun sejarah, yang dapat menyebabkan kebosanan pada siswa. Melalui penerapan model pembelajaran *Project Citizen*, proses pembelajaran dapat diubah menjadi lebih menantang (*challenging*), mengaktifkan (*activating*) dan subjek pembelajaran yang menjadi lebih bermakna (*powerfull learning*).

Program tersebut mendorong partisipasi aktif siswa dengan lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah atau masyarakat, serta mengembangkan kecerdasan sosial dan intelektual yang esensial bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab. Tujuan utama dari *Project Citizen* adalah memotivasi dan memberdayakan siswa untuk menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan demokratis melalui penelitian intensif terkait kebijakan publik di lingkungan sekolah atau masyarakat mereka. Materi pembelajaran dirancang untuk membantu siswa belajar mengawasi dan memengaruhi kebijakan publik, serta meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. *Project Citizen* memberikan peluang kepada siswa untuk terlibat dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, sambil melatih kemampuan berpikir kritis, berdialog, berdebat, bernegosiasi, bekerja sama, bersikap sopan, toleran, membuat

keputusan, dan menjalankan aksi warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk kepentingan bersama.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model *Project Citizen* memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari, terutama dalam konteks kewarganegaraan. Program ini mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan bersama organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengatasi permasalahan di sekolah atau lingkungan sekitarnya. Selain itu, program ini juga berperan dalam mengembangkan kecerdasan sosial dan intelektual peserta didik, yang merupakan aspek penting dalam membentuk kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab.

2. Tujuan Model Pembelajaran *Project Citizen*

Budimansyah (2009, hlm. 2) menyatakan bahwa tujuan dari pembelajaran *Project Citizen* adalah melatih peserta didik agar aktif dalam mengatasi masalah yang muncul di lingkungan sekolah, pemerintahan, dan masyarakat tempat mereka berinteraksi. Peran guru dalam model pembelajaran ini diartikan sebagai instruktur dan fasilitator yang memberikan bimbingan saat peserta didik melakukan penelitian. Aspek menarik dari model pembelajaran ini terletak pada partisipasi aktif peserta didik dalam membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan publik.

Dapat disimpulkan bahwa, tujuan pembelajaran *Project Citizen* adalah melatih peserta didik agar aktif dalam mengatasi masalah di lingkungan sekolah, pemerintahan, dan masyarakat. Guru berperan sebagai instruktur dan fasilitator yang memberikan bimbingan saat peserta didik melakukan penelitian. Model ini menonjolkan partisipasi aktif peserta didik dalam membahas permasalahan terkait kebijakan publik, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan kontekstual.

3. Implementasi *Project Citizen* dalam Pembelajaran

Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan (*Project Citizen*) bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru selama proses pembelajaran.

- 2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi masalah karakter dan kewarganegaraan.
- 3) Mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam menyelesaikan masalah proyek yang kompleks dan menghasilkan produk nyata.
- 4) Mengembangkan serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber daya, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek dan
- 5) Meningkatkan kerja sama antara peserta didik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Project Citizen*) memiliki tujuan utama untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru selama proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi masalah karakter dan kewarganegaraan, serta mendorong partisipasi aktif dalam menyelesaikan proyek-proyek kompleks yang menghasilkan produk nyata. Selanjutnya, implementasi ini juga bertujuan mengembangkan serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber daya, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Selain itu, pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat kerja sama antar peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dan mendukung perkembangan keterampilan sosial. Dengan demikian, keseluruhan tujuan pembelajaran *Project Citizen* melibatkan pemahaman konsep kewarganegaraan melalui pengalaman langsung, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, dan pengembangan keterampilan kerja sama serta pemecahan masalah.

4. Manfaat *Project Citizen*

Pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan (*Project Citizen*) memberikan manfaat dalam mengembangkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik, khususnya dalam aspek riset, analisis, dan presentasi. Dalam konteks riset, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan kecakapan meneliti melalui kegiatan seperti pembuatan kuesioner, pelaksanaan wawancara dan survei, penggunaan perpustakaan, serta pencarian sumber belajar di internet. Kecakapan menganalisis tercermin dalam kemampuan peserta didik dalam menafsirkan bukti atau data,

menggunakan statistik, mengenali bias, menyimpulkan temuan, dan menyusun rekomendasi. Sementara itu, keterampilan presentasi, termasuk penyajian, dapat dilihat melalui laporan tertulis, pidato publik, pembuatan handouts, dan persiapan konten untuk media sosial (Breslin, 2007, hlm. 114).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran berbasis proyek dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Project Citizen*) memberikan manfaat signifikan dalam mengembangkan keterampilan kewarganegaraan peserta didik. Aspek riset, analisis, dan presentasi terlihat terintegrasi, memungkinkan peserta didik mengasah kecakapan riset, menganalisis data, dan berkomunikasi efektif melalui berbagai bentuk presentasi. Pendekatan ini menciptakan pengalaman belajar holistik yang mendukung perkembangan komprehensif peserta didik dalam konteks kewarganegaraan.

5. Karakteristik *Project Citizen*

Karakteristik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis proyek (*Project Citizen*) meliputi:

- 1) Penekanan pada peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran.
- 2) Pendekatan berbasis masalah kewarganegaraan kontekstual untuk menemukan solusinya.
- 3) Durasi pembelajaran yang dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu, bahkan mencakup satu semester.
- 4) Partisipasi aktif peserta didik dalam pemecahan masalah melalui proyek.
- 5) Keterlibatan peserta didik dalam membuat keputusan, mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengelola informasi, merefleksikan tindakan, dan menyampaikan laporan secara publik.
- 6) Penfokusan proyek yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum.
- 7) Bersifat interdisipliner dan terintegritas dengan dunia nyata, isu, dan praktik-praktik.
- 8) Penggunaan berbagai strategi pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
- 9) Evaluasi dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.
- 10) Hasil akhir yang dihasilkan berupa produk,

Dengan menggambarkan karakteristik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan

berbasis proyek (*Project Citizen*), dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Dengan pendekatan berbasis masalah kewarganegaraan kontekstual, pembelajaran ini memiliki durasi yang fleksibel, melibatkan partisipasi aktif peserta didik, dan mendorong keterlibatan mereka dalam setiap tahap proyek. Fokus proyek sesuai dengan tujuan kurikulum, bersifat interdisipliner, dan terintegrasi dengan dunia nyata. Penggunaan strategi pembelajaran yang beragam mendukung pencapaian tujuan, sedangkan evaluasi dilakukan secara terus menerus. Hasil akhir berupa produk, dan baik proses maupun produk dipresentasikan di hadapan publik melalui showcase, menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik dan relevan dengan kehidupan nyata.

6. Kelebihan dan Kekurangan *Project Citizen*

Menurut CCE dalam Winataputra (2020, hlm. 31), manfaat pembelajaran *project citizen* meliputi beberapa aspek. Itu adalah:

- 1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk terhubung dengan peristiwa dan masalah kehidupan nyata.
- 2) Membantu siswa mengintegrasikan berbagai konsep dan gagasan yang berkaitan.
- 3) Mendorong peserta didik untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu.
- 4) Mendorong kerjasama antar siswa dalam kelompok.
- 5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi kemajuannya melalui penilaian diri.
- 6) Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan penilaian pembelajaran.
- 7) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat lainnya.

Menurut Fahrudin dalam Rohman (2013, hlm. 4), *Project Citizen* mempunyai beberapa kelemahan :

- 1) Memerlukan waktu pelaksanaan ideal 4-6 minggu.
- 2) Memerlukan biaya.
- 3) Guru perlu diberi motivasi

Peran guru dalam pembelajaran kewarganegaraan berbasis proyek (*Project Citizen*) adalah sebagai fasilitator. Fasilitator ini berarti guru bertugas untuk memfasilitasi terjadinya

kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik secara mandiri. Dalam konteks ini, memfasilitasi berarti guru menciptakan suatu kondisi atau suasana yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar secara aktif pada diri peserta didik. Guru juga berperan mendampingi peserta didik dalam kegiatan belajar berkelompok, menyediakan sumber belajar yang diperlukan, serta berfungsi sebagai partner dialog dalam proses belajar. Dengan demikian, guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang *fresh, bright, clear and constructive*.

Dalam pembelajaran kewarganegaraan berbasis proyek, peserta didik diajak untuk belajar secara mandiri dalam kelompok-kelompok kolaboratif. Umumnya, peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kolaboratif, dimana mereka mencari dan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang dibutuhkan dari berbagai sumber belajar. Mereka menggunakan informasi ini untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi, dengan tingkat ketergantungan pada guru yang tidak terlalu tinggi. Dalam konteks ini, peserta didik bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya secara mandiri dan belajar untuk mengatur diri sendiri dalam konteks kerja kelompok.

C. Kajian Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan kegiatan bersama seluruh individu dan merupakan inti dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Proses belajar merupakan kegiatan yang memerlukan pengalaman, bukan sekedar hafalan informasi. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku, bukan sekedar tugas atau latihan. Belajar bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, pembelajaran dapat dipandang sebagai serangkaian langkah atau prosedur yang harus diikuti.

Oemar Hamalik (2019, hlm. 36) mengartikan belajar sebagai adaptasi atau penguatan perilaku melalui pengalaman. Menurut Nursalim (2018, hlm. 1) pembelajaran saat ini dipandang perlu dan rutin bagi siswa yang tujuannya adalah untuk mengalami perubahan dalam dirinya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disusun dengan tujuan untuk mengubah potensi dan perilaku siswa kearah yang lebih positif.

Menurut Sugeng Widodo dan Dinda Urami (2018, hlm. 20) menyatakan bahwa

diantara berbagai prinsip pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang berlaku umum dan dapat dijadikan landasan dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti perhatian dan motivasi, aktivitas, keterlibatan atau pengalaman langsung.

Paradigma pembelajaran baru menekankan pada jumlah penawaran kursus atau halaman materi yang diberikan institusi, bukan jumlah pengetahuan yang dapat dibangun siswa secara aktif untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, standar keberhasilan pendidikan beralih dari tingkat pengajaran institusi ke tingkat pembelajaran siswa (Swarat et al., 2017). Pergeseran paradigma ini diikuti oleh pergeseran fokus tentang akuntabilitas kelembagaan. Artinya, ada peningkatan permintaan untuk bukti output dari pada mengukur input, seperti sumber daya, layanan, dan kurikulum organisasi. Output, atau dampak pada pembelajaran siswa yaitu seberapa baik siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan (Allen: 2004 Banta & Associates 2002).

2. Pengertian Hasil Belajar

Menurut Sulistiasih (2023, hlm. 1) hasil belajar adalah suatu istilah yang memiliki makna dan konotasi yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Istilah ini merujuk pada pencapaian atau prestasi akademik, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman yang dimiliki oleh individu setelah mengikuti proses pendidikan atau pembelajaran.

Namun, hasil belajar tidak hanya mencakup aspek pengetahuan atau keterampilan semata. Hal ini juga mencakup perkembangan aspek sosial, emosional, dan sikap peserta didik. Pendidikan tidak hanya tentang mengisi pikiran dengan fakta-fakta dan teori, tetapi juga tentang membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai yang akan membantu individu menjadi warga yang berkontribusi positif dalam masyarakat.

Hasil belajar siswa yang diinginkan adalah kemampuan yang mencakup aspek kognitif dasar hingga pengetahuan dan sikap yang diharapkan. Hasil belajar yang positif terlihat ketika siswa mampu menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan menjawab soal ujian dengan benar sesuai dengan petunjuk dan batas waktu yang telah ditentukan (Tumulo, 2022 hlm. 438)

Perubahan perilaku secara keseluruhan adalah hasil belajar, bukan hanya bagian dari potensi kemanusiaan. Tiga taksonomi ranah belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik diusulkan oleh bloom. Ranah afektif mencakup perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah psikomotorik mencakup kemampuan fisik seperti koordinasi saraf, manipulasi objek, dan keterampilan motoric dan saraf. Berdasarkan pengertian diatas, hasil belajar peserta didik dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh atau dicapai oleh siswa melalui pengalaman dan pendidikan.

Hutchings (2011) menekankan bahwa faktor utama penyebab perubahan yang lambat ini adalah kurangnya Upaya penilaian dalam disiplin ilmu tertentu : “ fokus penilaian pada hasil lintas sektor masuk akal, tetapi juga berarti bahwa penilaian pengetahuan dan kemampuan siswa dalam bidang tertentu, berfokus pada apa yang menjadi ciri khas bidang tersebut, kurang mendapat perhatian.” Kami mengakui keprihatinan Hutchings dan berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan auntabilitas yang seragam, perbedaan disiplin tidak boleh diabaikan.

Tujuan pembelajaran yang menunjukkan tujuan lembaga harus lebih penting daripada tujuan pembelajaran yang menunjukkan bagaimana siswa menggunakan pengetahuan. Program evaluasi yang berpusat pada tujuan pendidikan tidak memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini tidak ditemukan sampai tujuan pendidikan dikomunikasikan (Drexler, J. A. & Kleinsorge, I. K, 2000).

Proses belajar setiap siswa terdiri dari penilaian. Asesmen adalah “suatu proses, integral dengan pembelajaran, yang melibatkan pengamatan dan penilaian kinerja setiap siswa berdasarkan kriteria eksplisit, dengan umpan balik yang dihasilkan kepada siswa”, menurut Alverno College. Ini juga menawarkan keuntungan tambahan untuk menekankan hasil belajar yang dibingkai dalam kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dari pada apa yang mereka ingat.

3. Taksonomi Hasil Belajar

Langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran kewarganegaraan berbasis projek (*Project Citizen*) melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan proyek yang akan dijalankan

- 2) Merancang langkah-langkah penyelesaian proyek
- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan proyek
- 4) Menyelesaikan proyek dengan bantuan fasilitasi dan pemantauan dari guru
- 5) Menyusun laporan serta melakukan presentasi atau publikasi hasil proyek dan
- 6) Melakukan evaluasi terhadap hasil proyek

4. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Pencapaian prestasi belajar oleh siswa bersifat beragam, menunjukkan adanya variasi dalam hasil antara satu siswa dengan siswa lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor internal yang terkait dengan siswa itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan atau kondisi di luar diri siswa Slameto dalam Sulistiasih (2023, hlm. 5).

Ada beberapa faktor yang memiliki dampak pada hasil belajar, kemudian faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan internal.

1) Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan berdampak kepada kemampuan mereka dalam belajar. Faktor internal termasuk kecerdasan, minat, perhatian, motivasi, belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, dan kondisi fisik dan kesehatan.

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor diluar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajarnya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga termasuk keadaan ekonomi yang buruk, pertengkaran suami istri, perhatian yang kurang dari orang tua, dan perilaku sehari-hari yang buruk dari orang tua.

Bada et al. (2020) menyelidiki bagaimana guru berfungsi dengan baik di sekolah menengah Nigeria. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, gaya kepemimpinan, penentuan tujuan sekolah, dan manajemen materi intruksional adalah komponen penting keberhasilan yang mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah-sekolah Nigeria.

Pengajaran yang efektif, menurut Bobe dan Cooper (2020), didefinisikan sebagai kombinasi dari perilaku guru, pengetahuan guru tentang materi pelajaran dan keyakinan atau sikap siswa dan guru terhadap peningkatan kinerja siswa. Oleh karena itu, pengajaran yang efektif dan pendekatan belajar siswa selalu terkait dengan kualitas pengalaman belajar. Badamas (2021) menyatakan bahwa karakter guru dapat mempengaruhi prestasi akademik peserta didik di sekolah

Studi Oluwatayo et al. (2023) menemukan bahwa beberapa komponen yang menentukan efisiensi sekolah di Nigeria adalah kepemilikan fasilitas, kebersihan sekolah, jumlah guru yang mengunjungi setiap siswa, rasio guru siswa, dan jumlah kunjungan pemerintah. Defisit infrastruktur, penundaan pembayaran guru, dan inefisiensi guru mengganggu kinerja sektor pendidikan Nigeria. Untuk mengatasi defisit infrastruktur, studi ini menyarankan peningkatan dan pengawasan investasi di sektor pendidikan. Untuk mengurangi rasio guru dan siswa dan meningkatkan kinerja siswa, pemerintah harus mempekerjakan guru yang lebih berkualitas ke sekolah dasar Nigeria.

Menurut hasil penelitian ini, untuk meningkatkan semangat dan kinerja guru penting bagi mereka yang dibayar tepat waktu dan dengan kompensasi yang layak. Terakhir, kunjungan inspeksi atau pemantauan yang dilakukan oleh petugas pendidikan dari pemerintah ke institusi pendidikan harus ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal kerja.

D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu *civics*, *civic education*, dan *citizenship education* adalah tiga istilah teknis yang sering digunakan untuk menerjemahkan konsep Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, ketiga istilah tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang pendidikan kewarganegaraan.

Istilah *civics* mengacu pada *the science of citizenship* atau ilmu kewarganegaraan. Muhammad Numan Somantri (2001), Creshore menyatakan bahawa ilmu kewarganegaraan

didefinisikan sebagai “*The Science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collection, the individual in his relation to the state*”. Namun pendapat ini memberi batasan bahwa ilmu kewarganegaraan identik dengan ilmu kewarganegaraan yang menyelidiki hubungan antara orang-orang warga negara dengan organisasi terkecil hingga organisasi tertinggi.

Istilah *civics education* cenderung digunakan secara spesifik sebagai mata pelajaran dalam lingkup pendidikan formal. Sebagaimana pendapat Cogan dalam Muhamad Subarkah (2009) yang mengartikan *civics education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”. Menurut pengertian ini, *civics education* mata pelajaran utama di sekolah. Tujuannya adalah untuk menyiapkan remaja untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat saat mereka dewasa.

Istilah *citizenship education* digunakan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mengandung makna bahwa cakupan *citizenship education* atau *education for citizenship* lebih luas meliputi pendidikan kewarganegaraan dalam lembaga formal seperti (sekolah dan program guru) serta di luar lembaga formal seperti program penataran dan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Seseorang berpendapat bahwa *civic education* diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Muhammad Subarkah (2009) istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengacu pada suatu subjek.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Civic Education banyak dipahami sebagai wahana untuk membina dan mewujudkan warga negara yang baik, cerdas, kritis, dan partisipatif. Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) disebut dalam beberapa negara sebagai *Citizenship Education*, *Human Right Education*, dan *Democracy Education*. Di Indonesia *Civic Education* diterjemahkan dalam dua istilah yaitu Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah pendidikan Kewargaan secara substantif tidak hanya mengajarkan anak-anak menjadi warga negara yang cerdas yang menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga negara dunia (*global society*).

Pendapat ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan secara substansial lebih luas dari pada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Muhammad Numan Somantri (2001,

hlm. 299), Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berfokus pada demokrasi politik dan dikombinasikan dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, serta manfaat pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Tujuan dari program ini adalah untuk mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, bersikap dan bertindak demokratis untuk mempersiapkan diri mereka untuk hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pendapat para ahli dalam pengertian diatas, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal". Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, atau *civic education* adalah program pendidikan yang diwajibkan di sekolah yang bertujuan untuk mendidik generasi muda untuk berpartisipasi dan berpikir demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai bagian dari pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah menjadi komponen utama. Menurut Udin S. Winataputra (2007) dalam hal ini terbagi dalam lima status :

- a) Pertama, sebagai mata pelajaran di institusi pendidikan
- b) Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.
- c) Ketiga, sebagai salah satu bagian dari kurikulum pendidikan guru, disiplin ilmu pengetahuan sosial merupakan bagian dari kurikulum.
- d) Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Penataran P4) atau bentuk serupa yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk program henti operasi.
- e) Kelima, sebuah kerangka konseptual yang dibuat oleh individu dan kelompok pakar yang relevan, yang digunakan sebagai landasan dan kerangka berpikir untuk status pendidikan kewarganegaraan pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran dan identitas kewarganegaraan serta memperkuat fondasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia.

b. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai Mata Pelajaran di Sekolah.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) menetapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus menjadi mata pelajaran wajib disekolah dasar dan menengah, serta menjadi mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi.

Menurut Permendiknas (2006) mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun warga negara yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang ditetapkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendapat lain menyatakan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta didik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Kardiman (2009) menyatakan bahwa “Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga negara”. Dan bahwa “Misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak-hak warga negara”. Adapun tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi masalah kewarganegaraan.
- b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan anti korupsi.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan sifat-sifat masyarakat Indonesia agar tidak hidup bersama orang lain.
- d) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan negara lain dalam persaingan global (Depdiknas, 2006, hlm. 1)

Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education* telah mengalami perkembangan. *Civic education* telah bergerak menjadi *citizenship education* atau *education for citizenship*. PPKn yang diartikan sebagai mata pelajaran PPKn di persekolahan, telah bergerak menjadi *citizenship education* atau *education for citizenship*, dengan kata lain PPKn adalah pembelajaran yang mencakup tidak hanya pembelajaran di sekolah tetapi juga

pembelajaran di luar sekolah, seperti rumah, di media, di organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan sebagainya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya teratas pada belajar di sekolah itu juga mencakup belajar di berbagai tempat, seperti keluarga, kelompok masyarakat, dan lembaga keagamaan. Pengalaman belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah pada dasarnya bertumpu pada satu tujuan, menjadi warga negara yang baik. Menurut Winataputra (2007), ciri-ciri warga negara yang baik adalah :

- (1) Seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Mencintai sesama manusia, keluarga, bangsa, dan negaranya
- (3) Menghormati orang lain sebagai warga negaranya
- (4) Memiliki kemampuan untuk hidup bersama dalam komunitas yang beragam,
- (5) Toleransi terhadap agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai suatu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah bertujuan untuk membangun warga negara yang dapat berpikir kritis, memeriksa, bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu masalah utama dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah adalah penggunaan model pembelajaran yang tidak tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran PPKn. Model yang dipilih guru untuk menyampaikan materi PPKn terkesan kaku, dan guru cenderung mendominasi kelas selama proses pembelajaran. Menurut Dedi Dwitagama (2008): "*How civics behaviour*" menjadi terabaikan.

Guru lebih mementingkan upayanya mengejar target dalam menyelesaikan materi serta nilai-nilai ujian yang memuaskan, sehingga pembinaan sikap dan nilai untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan partisipatif (*smart and good citizen*) yang seharusnya ditanamkan pada diri sendiri peserta didik tidak terlaksana. Jadi tidak salah pendapat yang mengatakan bahwa dalam pembelajaran *Civic Education* di negara kita "yang paling kelihatan knowing saja. Orang banyak tahu demokrasi itu pun baru pada tingkat akademis. Doing nya ada tapi kalua dipersentase mungkin knowingnya 75%" (Udin S. Winataputra,

2006).

Hal ini menunjukkan bahwa pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang lebih baik hanya diserap secara teoritis oleh siswa, tetapi tidak banyak yang dilakukan. Berdasarkan hal-hal diatas, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus berusaha untuk mengubah model pembelajaran PPKn menjadi pendekatan yang melibatkan peran aktif peserta didik.

Ini karena *civic education* tidak hanya sekedar teoretis tetapi juga harus dipraktikkan dalam dunia nyata. Ace Suryadi mengatakan dalam Fachrul Razi (2001) bahwa *civic education* menekankan pada empat hal, yaitu “*civic education* bukan sebagai indoktrinasi politik, *civic education* mengembangkan *state of mind*, *civic education* merupakan suatu proses pencerdasan, *civic education* sebagai laboratorium demokrasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a) *Civic Education* bukan sebagai indoktrinasi politik.

Ini berarti bahwa pendidikan publik harus dilakukan untuk membangun warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, bukan semata-mata sebagai alat para penguasa memberikan indoktrinasi politik kepada warga negara.

b) *Civic Education* mengembangkan *state of mind*

Hal ini dimaksudkan bahwa *civic education* berpusat pada pembentukan bangsa yang cerdas dan berdaya nalar.

c) *Civic Education* merupakan suatu proses pencerdasan

Untuk mencapai tujuan ini, metode mengajar yang selama ini dianggap kaku dan konvensional harus diubah menjadi model yang partisipatif dengan menekankan pada nalar dan logika.

d) *Civic Education* sebagai laboratorium demokrasi

Ini berarti bahwa *civic education* harus mengajarkan sikap dan perilaku demokratis. Bukan hanya mengajar berdemokratis (*teaching democracy*) tetapi juga cara hidup demokrasi.

Semua yang disebutkan diatas menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah tidak hanya menekankan pada pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Namun, lebih dari itu adalah mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, seorang guru harus dapat mengubah materi pelajaran PPKn teoretis menjadi pelajaran yang menyenangkan dan mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Ini tentu saja tidak termasuk memilih pendekatan pendidikan yang tepat untuk menyampaikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

c. Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun pendapat lain tentang tujuan PKn yang dikemukakan Djahiri Susanti (2013, hlm. 12) menyatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

a) Secara Umum

Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu: “mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

b) Secara Khusus

Tujuan pendidikan keagamaan (PKn) adalah untuk menumbuhkan norma-norma moral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang menanamkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai grup

agama, sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan dengan prioritas penting atas kepentingan individu dan kelompok sehingga perbedaan melalui musyawarah mufakat untuk mengatasi pendapat atau kepentingan, juga tindakan yang mendukung perjuangan untuk keadilan sosial bagi semua warga negara Indonesia.

Membentuk sifat atau sifat warga negara yang baik adalah tujuan mata pelajaran PKN. Menurut Ubaedillah dan Rozak (2013, hlm. 18), pendidikan kewarganegaraan (PKN) dimaksudkan untuk membangun karakter bangsa Indonesia, antara lain:

- a) Meningkatkan kemampuan warga negara Indonesia untuk berpartisipasi secara berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan nasional dan internasional.
- b) Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis sambil tetap berkomitmen untuk menjaga persatuan dan integritas negara.
- c) Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yang mencakup prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PPKn

Dilihat dari ruang lingkup kurikulum pada tahun 2006 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pada kurikulum 2013 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang lingkup mata Pelajaran Pkn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b) Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di Masyarakat, peraturan – peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, system hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional
- c) Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota Masyarakat, instrument nasional dan internasional HAM, pengajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- d) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai Masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai setiap keputusan bersama, prestasi diri, persamaan antara kedudukan warga negara.
- e) Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju Masyarakat yang madani, system pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
- g) Pancasila meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai- nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h) Globalisasi, meliputi, globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut materi Pkn memuat tentang nilai, norma, peraturan hukum yang berlaku untuk warga negaranya, sehingga peserta didik dapat mengamalkan materi dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi karakter pada peserta didik.

Adapun ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah. Ruang Lingkup

mata Pelajaran PPKn untuk pendidikan dasar menengah secara umum dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa.
- b) UUD 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia.
- d) Bhineka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, dalam mata Pelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 adalah mata Pelajaran PPKn memuat empat pilar kebangsaan yang menjiwai lahirnya kurikulum 2013. Empat pilar ini diharapkan mampu menjadikan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, baik, dapat menjadi seorang pemimpin bangsa dan negara di masa depan yang cerdas, amanah, jujur, serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa terdapat penyerderhanaan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Penulis dapat menyimpulkan bahwa materi yang dibahas dalam kurikulum 2006 dan 2013 untuk mata pelajaran PPKn dikaitkan dengan empat pilar kebangsaan yang dikuatkan dalam kurikulum 2013. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa materi yang dibahas dalam kurikulum 2006 dan 2013 bukan berarti tidak akan diajarkan dalam kurikulum 2013. Empat pilar kebangsaan dimaksudkan untuk mengajarkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan laporan, penulis melihat referensi dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari variable penelitian, antara lain :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Sudrajat (2016)

Judul Jurnal :

“Pengaruh Model Pembelajaran *Project Citizen* Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PPKn SMA di Kota Semarang”

Penelitian tersebut dilakukan di SMA Ksatria 1 Semarang dan di SMAN 3 Semarang dengan menggunakan studi eksperimen. Dari hasil penelitian tersebut bahwa

Penggunaan model pembelajaran konvensional dan pembelajaran *project citizen* keduanya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tetapi peningkatan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran *project citizen* mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Di SMA N 3 Semarang peningkatannya mencapai 19,3% dan di SMA Ksatrian 1 Semarang peningkatannya mencapai 14,3%. Kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran *project citizen* dengan yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Pembelajaran PPKn berbasis *project citizen* ini direkomendasikan sebagai salah satu alternatif pembelajaran untuk merangsang keterlibatan seluruh potensi diri siswa sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Dari hasil di atas rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada para guru SMA dalam pembelajaran PPKn di SMA. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rujukan ini untuk mengetahui teori dan meningkatkan hasil belajar yang optimal.

2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Widya Cahya N, Putri (2020)

Judul Jurnal :

“Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 7 Kota Jambi”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan observasi, pada penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 7 Kota Jambi, peneliti datang ke SMA tersebut dan mengemukakan bahwa minat belajar siswa masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya minat siswa dalam memperhatikan guru ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Di SMA Negeri 7 Kota Jambi, model tradisional (Ceramah) masih dijadikan metode utama pada salah satu pembelajaran yang umum digunakan khususnya PPKn. Penggunaan model pembelajaran tradisional saja membuat siswa pasif mendengarkan ceramah guru. Tetapi pada K-13 pembelajaran menjadi lebih terfokus pada siswa, Dimana siswa lebih berperan aktif dibandingkan guru. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini karena perlu dipilihnya suatu metode untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairina (2020)

Judul Jurnal :

“Pengaruh Model Pembelajaran Proyek Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKN”.

Hasil dari penelitian ini pada kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran proyek dan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Sebelum diberikan perlakuan yang berbeda pada kedua kelas tersebut, kedua kelas tersebut diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Setelah diketahui kemampuan awal kedua kelas, selanjutnya peserta didik diberikan pembelajaran dengan cara yang berbeda namun pada tema yang sama. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik pada mata pelajaran PPKN. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini sebagai salah satu pendekatan atau metode pembelajaran.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Niken Chettrin Sitanggang (2023) Judul Jurnal :

“ Pengaruh Sarana Prasarana dan Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Peserta Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Swasta Karya Bhakti Medan Tahun Pelajaran 2022/2023”.

Hasil dari penelitian ini hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terbukti bahwa sarana prasarana pembelajaran di SMP Swasta Karya Bhakti mendapat penilaian baik, hal ini didapatkan dari perhitungan angket dengan menggunakan rumus prosentase, yang menunjukkan nilai sebesar 78%. Sementara itu, lingkungan sekolah di SMP Swasta Karya Bhakti dinilai sangat baik, dengan hasil perhitungan angket mencapai nilai sebesar 84%. Selain itu, prestasi belajar siswa di mata pelajaran SMP Swasta Karya Bhakti dikategorikan sebagai sangat baik. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini (2018)

Judul Jurnal :

“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar PKn Dengan Model *Project Citizen* Siswa Kelas IX A di SMP Negeri 03 Agung Way Kanan Lampung Tahun Ajaran 2018/2019”.

Penelitian tersebut dilakukan di SMP Negeri 03 Agung Way Kanan Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran *Project Citizen* Siswa Kelas IX A Di SMP Negeri 03 Negeri Agung Way Kanan Lampung Tahun Ajaran 2018/2019 dapat meningkatkan prestasi belajar PKn. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata prestasi belajar pada pra siklus 61,26, pada siklus I sebesar 73,57, dan meningkat pada siklus II sebesar 83,88. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif.

6. **Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriani (2017) dari IKIP-PGRI Pontianak**

Judul Jurnal :

“ Pengaruh Model Pembelajaran *Project Citizen* Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X SMA Negeri 3 Kabupaten Sanggau”.

Penelitian tersebut dilakukan di SMA Negeri 3 Kabupaten Sanggau dengan menggunakan metode eksperimen dengan bentuk penelitian yaitu eksperimental semu (*quasi experimental design*). Dari hasil penelitian tersebut penerapan model *project citizen* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelas X SMA Negeri 3 Kabupaten Sanggau dapat memberikan hasil belajar yang cukup optimal serta sesuai dengan yang diinginkan. Pengaruh model *Project Citizen* pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikelas X IPA1 SMA Negeri 3 Sanggau ini menunjukkan perubahan yang sangat baik dalam meningkatkan hasil belajar serta dapat memberikan pemanfaatan kepada pihak sekolah untuk dapat memaksimalkan penggunaan model *Project Citizen*. Adapun menurut Yayuk Kurniawati dalam skripsi hasil penelitiannya (2016:92) bahwa hasil perhitungan uji t diperoleh hasil t hitung sebesar 14,07 lebih besar dari pada t tabel; 1,7011 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pengaruh model pembelajaran *project citizen* terhadap hasil belajar Pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Rasau Jaya. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini karena metode pembelajaran memberikan manfaat tidak hanya kepada siswa tetapi kepada pihak sekolah juga.

7. **Hasil penelitian yang dilakukan oleh Norlaili Hidayati, FKIP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2016**

Judul Jurnal :

“Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan (*Civic Skill*) Melalui Pembelajaran

PKn Berbasis *Project Citizen* (Studi Kuasi Eksperimen Di SMK YPT Banjarmasin)”.

Penelitian tersebut di lakukan di SMK YPT Banjarmasin dengan menggunakan studi kuasi eksperimen. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil kecakapan intelektual pada kelompok model *project citizen* adalah 16,71 nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan kecakapan intelektual kelompok model konvensional yang sebesar 13,57. Serta kecakapan partisipasi pada kelompok model *project citizen* adalah 3,8129 nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan kecakapan partisipasi kelompok model konvensional yang sebesar 3,3179. Sehingga dapat diambil gambaran yang jelas bahwa penerapan model *project citizen* dapat meningkatkan kecakapan kewarganegaraan yang meliputi kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini karena metode pembelajaran atau model pembelajaran tidak hanya dapat meningkatkan hasil belajar.

8. **Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih Puji Mulyoto dan Samsuri, Pascasarjana PPKn UNY Tahun 2017**

Judul Jurnal :

“Pengaruh Model *Project Citizen* dengan Pendekatan Sainifik Terhadap Penguasaan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”.

Peneliti tersebut di lakukan di SMP Negeri 5 Yogyakarta dengan menggunakan studi kuasi eksperiment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model *project citizen* dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn terhadap penguasaan kompetensi kewarganegaraan dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik. Hal ini ditunjukkan hasil posttest kelompok kontrol dan eksperimen to 7,182 > ttabel 2,000. Pada setiap dimensi kompetensi kewarganegaraan juga menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (to 6,088 > ttabel 2,000), sikap kewarganegaraan (to 2,055 > ttabel 2,000). Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini karena metode pembelajaran atau model pembelajaran tidak hanya dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan sikap kewarganegaraan.

9. **Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titik Haryati dan Noor Rochman, Jurnal Ilmiah Civis, Volume II, No 2, Juli 2012**

Judul Jurnal :

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran *Project Citizen* dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di Kelas VIII D SMP Negeri 3 Semarang. Kualitas pembelajaran PPKn sebelum penggunaan model pembelajaran *Project Citizen* yaitu 52% (kurang baik), namun setelah penggunaan model *Project Citizen* meningkat menjadi 81% (sangat baik). Kesimpulan dengan menggunakan model pembelajaran *Project Citizen* dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Semarang dengan rata-rata peningkatan kualitas pembelajaran sebesar 29%, namun masih ada kendala dan hambatan antara lain keterbatasan waktu, minimnya biaya serta keterbatasan tenaga pengajar dan siswa. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini karena metode pembelajaran atau model pembelajaran selain meningkatkan hasil belajar dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran.

10. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Efi Miftah Faridli (2011)

Judul Jurnal :

“Pengaruh Model *Project Citizen* Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Siswa SMA Pada Konsep Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional”

Penelitian tersebut dilakukan di SMA 1 Cimahi Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan rancangan quasi eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh Signifikan model *Project Citizen* terhadap penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi maka diuji perbedaan rata-rata tingkat penanaman nilai-nilai anti korupsi siswa sebelum dan setelah mengikuti proses pembelajaran untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Dari perhitungan ternyata Siswa kelas eksperimen mengalami peningkatan sikap yang signifikan sebelum dan sesudah proses pembelajaran sedangkan pada siswa kelas kontrol tidak peningkatan sikap tidak berubah secara signifikan. Perhitungan sebelumnya, terdapat perbedaan rata-rata dan peningkatan sikap siswa yang signifikan mengenai nilai-nilai anti korupsi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang menggunakan model *Project Citizen* mempunyai rata-rata dan

peningkatan sikap yang signifikan dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Untuk mengetahui pengaruh model *Project Citizen* dalam pembelajaran PKn terhadap Penanaman Nilai-nilai anti korupsi di kelas eksperimen maka dilakukan uji hipotesis dengan uji korelasi sederhana (*zero order, bivariat*) dengan teknik *Pearson Correlations*. Interpretasi terhadap hubungan antar variabel dilakukan dengan mengkaji hubungan antar variabel serta di telaah kuat atau lemahnya korelasi. Oleh karena itu, peneliti memilih rujukan ini sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif.

F. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Model Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik

Dalam proses pembelajaran yang berfokus pada penerapan model pembelajaran ini, kelas control akan menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode diskusi, dan kelas eksperimen akan menggunakan model pembelajaran berbasis *project citizen*. Pembelajaran berbasis proyek akan disajikan dalam bentuk penentuan pertanyaan mendasar, yang akan digunakan sebagai acuan untuk peserta didik.

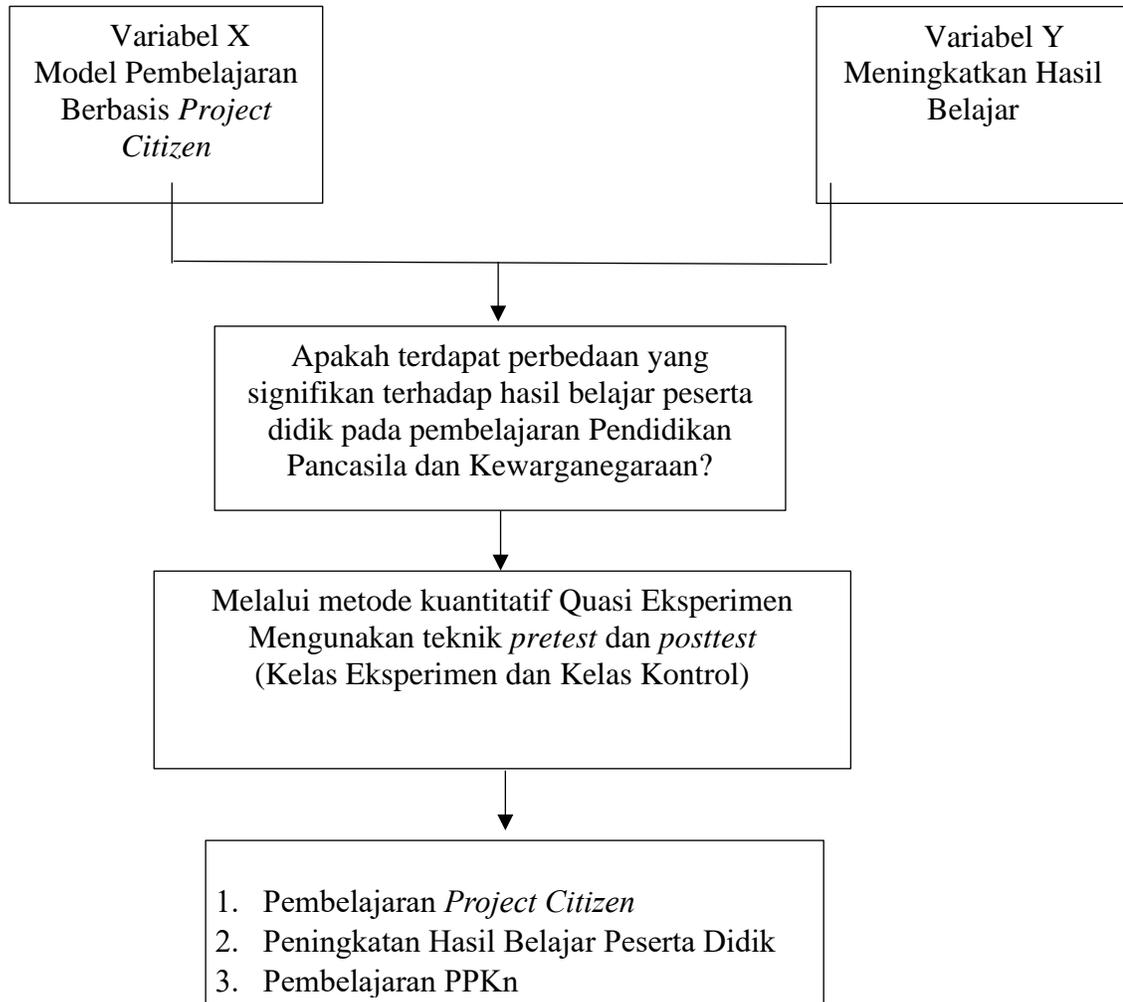
Dengan cara ini, siswa akan diminta untuk belajar mencari solusi kasus secara efektif dan efisien. Mereka juga diminta untuk bekerja sama dengan rekan sekelompoknya untuk memilih masalah yang paling sulit atau paling mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Pembelajaran berbasis *project citizen* juga menyediakan pengalaman belajar yang kompleks yang melibatkan siswa dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Sehingga suasana belajar menjadi menyenangkan, siswa merasa nyaman selama proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis *project citizen* dapat membantu siswa menjadi lebih kreatif dan efektif. Hasil belajar yang lebih baik berasal dari kegiatan nyata pemecahan kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan pengetahuan dan keterampilannya sendiri melalui proses bertanya, kerja kelompok, dan merefleksikan apa yang mereka pelajari.

Model *project citizen* merupakan satu *instructional treatment* yang berbasis

masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Adapun dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 2.1 . Alur Kerangka Berpikir



G. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi dapat didefinisikan sebagai landasan intelektual dari suatu aliran pemikiran, yang merupakan ide dasar atau konsep tanpa dukungan yang diperlukan untuk mendukung ide-ide berikutnya. Asumsi juga dapat dianggap sebagai poin awal suatu kegiatan atau proses dalam suatu sistem, karena tanpa asumsi, proses tersebut akan menjadi tidak terarah. Anggapan dasar

atau postulat, di sisi lain, merupakan suatu prinsip dasar yang telah diterima oleh peneliti dan menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut.

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kajian teori hingga kerangka piker sebelumnya, maka hipotesis Tindakan penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

- 1) Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam penerapan model Pembelajaran Berbasis *Project Citizen* terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cibingbin.
- 2) Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model Pembelajaran Berbasis *Project Citizen* terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cibingbin.